



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 33 /PMK.07/2011

TENTANG

ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, telah dialokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 66A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diatur oleh Gubernur, untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4755);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
 3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI
SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yang selanjutnya disingkat DBH CHT, merupakan bagian dari Anggaran Transfer ke Daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2011.
- (2) DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau dan/atau provinsi penghasil tembakau.

Pasal 2

- (1) DBH CHT untuk Tahun Anggaran 2011 dialokasikan sebesar Rp1.201.357.960.000,00 (satu triliun dua ratus satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (2) DBH CHT untuk Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 2% (dua persen) dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
- (3) DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alokasi sementara untuk provinsi, kabupaten, dan kota yang pembagiannya di masing-masing daerah diatur oleh gubernur di daerah yang bersangkutan.
- (4) Alokasi sementara DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibagikan dengan dengan komposisi 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi, 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten/kota daerah penghasil, dan 30% (tiga puluh persen) untuk kabupaten/kota lainnya.
- (5) Pembagian alokasi sementara DBH CHT Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk provinsi, kabupaten, dan kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal gubernur telah menyampaikan pembagian alokasi DBH CHT kepada Menteri Keuangan, maka alokasi DBH CHT yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan alokasi DBH CHT untuk provinsi, kabupaten, dan kota di provinsi yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Gubernur yang telah menyampaikan pembagian alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Provinsi Banten, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (3) Dalam hal gubernur belum menyampaikan pembagian alokasi DBH CHT kepada Menteri Keuangan, maka alokasi DBH CHT yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan alokasi DBH CHT per provinsi secara keseluruhan tidak dirinci untuk provinsi, kabupaten, dan kota di provinsi yang bersangkutan.
- (4) Gubernur yang belum menyampaikan pembagian alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Provinsi Jambi, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur Provinsi Lampung, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Bali, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, dan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
- (5) Dalam hal gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah menyampaikan pembagian alokasi DBH CHT provinsi, kabupaten, dan kota, sepanjang tidak melampaui Tahun Anggaran 2011, maka terhadap Peraturan Menteri Keuangan ini akan dilakukan perubahan dengan menambahkan rincian alokasi untuk provinsi, kabupaten, dan kota bersangkutan.

Pasal 4

Penggunaan DBH CHT untuk provinsi, kabupaten, dan kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran DBH CHT Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan secara triwulanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Triwulan Pertama sebesar 20% (dua puluh persen), Triwulan Kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dan Triwulan Ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penetapan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Triwulan Keempat adalah sebesar selisih antara penetapan alokasi definitif DBH CHT dengan jumlah dana yang telah disalurkan selama Triwulan Pertama sampai dengan Triwulan Ketiga berdasarkan penetapan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan kepada provinsi, kabupaten dan kota di daerah provinsi bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2011

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

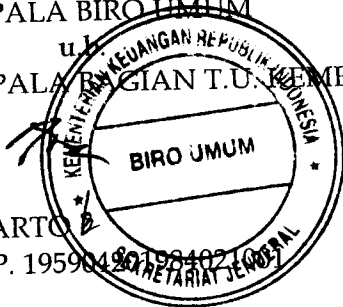
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BANGSIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP. 1959042010940210031





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ALOKASI SEMENTARA

DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

TAHUN ANGGARAN 2011

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 33 /PMK.07/2011 TENTANG
ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2011

dalam rupiah

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
I	Total Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	2.666.152.527
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	799.845.762
2	Kab. Aceh Barat	44.435.875
3	Kab. Aceh Besar	44.435.875
4	Kab. Aceh Selatan	44.435.875
5	Kab. Aceh Singkil	44.435.875
6	Kab. Aceh Tengah	213.292.203
7	Kab. Aceh Tenggara	44.435.875
8	Kab. Aceh Timur	44.435.875
9	Kab. Aceh Utara	44.435.875
10	Kab. Bireuen	44.435.875
11	Kab. Aceh Pidie	213.292.203
12	Kab. Simeulue	44.435.875
13	Kota Banda Aceh	44.435.875
14	Kota Sabang	44.435.875
15	Kota Langsa	44.435.875
16	Kota Lhokseumawe	44.435.875
17	Kab. Nagan Raya	44.435.875
18	Kab. Aceh Jaya	44.435.875
19	Kab. Aceh Barat Daya	44.435.875
20	Kab. Gayo Lues	213.292.203
21	Kab. Aceh Tamiang	44.435.875
22	Kab. Bener Meriah	213.292.203
23	Kab. Pidie Jaya	213.292.203
24	Kota Subulussalam	44.435.875
II	Total Provinsi Sumatera Utara	8.800.702.111
III	Total Provinsi Sumatera Barat	4.711.311.677
1	Provinsi Sumatera Barat	1.413.393.503
2	Kab. Limapuluh Kota	1.187.379.496
3	Kab. Agam	196.230.801
4	Kab. Kepulauan Mentawai	74.389.132



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
5	Kab. Padang Pariaman	74.389.132
6	Kab. Pasaman	184.920.205
7	Kab. Pesisir Selatan	74.389.132
8	Kab. Sijunjung	74.389.132
9	Kab. Solok	212.916.355
10	Kab. Tanah Datar	205.654.596
11	Kota Bukit Tinggi	74.389.132
12	Kota Padang Panjang	74.389.132
13	Kota Padang	74.389.132
14	Kota Payakumbuh	215.255.665
15	Kota Sawahlunto	202.891.472
16	Kota Solok	74.389.132
17	Kota Pariaman	74.389.132
18	Kab. Pasaman Barat	74.389.132
19	Kab. Dharmasraya	74.389.132
20	Kab. Solok Selatan	74.389.132
IV	Total Provinsi Kepulauan Riau	1.649.969.338
V	Total Provinsi Jambi	2.202.342.398
VI	Total Provinsi Sumatera Selatan	1.829.805.049
1	Provinsi Sumatera Selatan	548.941.515
2	Kab. Lahat	182.980.505
3	Kab. Musi Banyuasin	36.596.101
4	Kab. Musi Rawas	36.596.101
5	Kab. Muara Enim	36.596.101
6	Kab. Ogan Komering Ilir	36.596.101
7	Kab. Ogan Komering Ulu	36.596.101
8	Kota Palembang	36.596.101
9	Kota Pagar Alam	182.980.505
10	Kota Lubuk Linggau	182.980.505
11	Kota Prabumulih	36.596.101
12	Kab. Banyuasin	36.596.101
13	Kab. Ogan Ilir	36.596.101
14	Kab. OKU Timur	182.980.505
15	Kab. OKU Selatan	182.980.505
16	Kab. Empat Lawang	36.596.101
VII	Total Provinsi Lampung	3.278.017.413



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
VIII	Total Provinsi DKI Jakarta	1.503.393.714
IX	Total Provinsi Jawa Barat	94.791.583.825
1	Provinsi Jawa Barat	28.437.475.162
2	Kab. Bandung	2.187.307.060
3	Kab. Bekasi	10.414.478.140
4	Kab. Bogor	1.004.632.005
5	Kab. Ciamis	1.586.353.522
6	Kab. Cianjur	1.597.627.430
7	Kab. Cirebon	1.796.508.233
8	Kab. Garut	6.037.160.796
9	Kab. Indramayu	1.101.187.703
10	Kab. Karawang	7.080.460.263
11	Kab. Kuningan	1.453.412.828
12	Kab. Majalengka	4.786.930.865
13	Kab. Purwakarta	1.545.635.712
14	Kab. Subang	1.819.391.360
15	Kab. Sukabumi	1.302.369.006
16	Kab. Sumedang	5.510.583.891
17	Kab. Tasikmalaya	1.487.048.450
18	Kota Bandung	1.386.814.858
19	Kota Bekasi	1.164.805.676
20	Kota Bogor	1.037.455.468
21	Kota Cirebon	4.273.743.806
22	Kota Depok	1.402.867.794
23	Kota Sukabumi	1.358.657.907
24	Kota Cimahi	1.115.775.303
25	Kota Tasikmalaya	1.363.088.140
26	Kota Banjar	1.308.614.992
27	Kab. Bandung Barat	1.231.197.455
X	Total Provinsi Banten	1.962.108.237
1	Provinsi Banten	588.632.000
2	Kab. Lebak	98.105.400
3	Kab. Pandeglang	98.105.400
4	Kab. Serang	558.510.700
5	Kab. Tangerang	98.105.400
6	Kota Cilegon	98.105.400



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
7	Kota Tangerang	98.105.400
8	Kota Serang	226.333.137
9	Kota Tangerang Selatan	98.105.400
XI	Total Provinsi Jawa Tengah	288.124.894.231
1	Provinsi Jawa Tengah	86.437.468.274
2	Kab. Banjarnegara	2.911.825.031
3	Kab. Banyumas	2.697.137.362
4	Kab. Batang	4.342.879.986
5	Kab. Blora	4.159.630.917
6	Kab. Boyolali	7.240.699.563
7	Kab. Brebes	2.666.028.949
8	Kab. Cilacap	2.681.066.056
9	Kab. Demak	7.189.952.227
10	Kab. Grobogan	3.917.719.934
11	Kab. Jepara	8.582.289.843
12	Kab. Karanganyar	3.913.213.833
13	Kab. Kebumen	3.093.160.294
14	Kab. Kendal	13.775.522.622
15	Kab. Klaten	8.418.729.591
16	Kab. Kudus	50.326.742.987
17	Kab. Magelang	6.436.759.494
18	Kab. Pati	3.737.790.771
19	Kab. Pekalongan	2.686.312.802
20	Kab. Pemasang	2.701.430.700
21	Kab. Purbalingga	3.070.036.064
22	Kab. Purworejo	3.129.408.776
23	Kab. Rembang	2.810.126.241
24	Kab. Semarang	3.265.655.274
25	Kab. Sragen	2.979.741.199
26	Kab. Sukoharjo	3.230.516.590
27	Kab. Tegal	2.919.517.754
28	Kab. Temanggung	11.691.928.559
29	Kab. Wonogiri	2.639.330.591
30	Kab. Wonosobo	5.016.022.345
31	Kota Magelang	2.598.886.996
32	Kota Pekalongan	3.062.168.016



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
33	Kota Salatiga	3.010.606.690
34	Kota Semarang	5.003.304.226
35	Kota Surakarta	3.090.350.044
36	Kota Tegal	2.690.933.630
XII	Total Provinsi D.I. Yogyakarta	17.123.879.595
1	Provinsi D.I. Yogyakarta	5.137.163.879
2	Kab. Bantul	3.424.775.919
3	Kab. Gunung Kidul	1.712.387.960
4	Kab. Kulon Progo	2.568.581.939
5	Kab. Sleman	2.397.343.143
6	Kota Yogyakarta	1.883.626.755
XIII	Total Provinsi Jawa Timur	618.750.828.561
1	Provinsi Jawa Timur	185.625.248.568
2	Kab. Bangkalan	5.403.560.049
3	Kab. Banyuwangi	6.318.083.016
4	Kab. Blitar	8.388.227.539
5	Kab. Bojonegoro	17.592.672.637
6	Kab. Bondowoso	11.240.642.873
7	Kab. Gresik	5.433.736.207
8	Kab. Jember	10.928.481.689
9	Kab. Jombang	9.434.407.027
10	Kab. Kediri	22.454.025.945
11	Kab. Lamongan	10.908.828.787
12	Kab. Lumajang	6.538.368.381
13	Kab. Madiun	6.492.252.324
14	Kab. Magetan	5.875.668.351
15	Kab. Malang	27.393.353.274
16	Kab. Mojokerto	6.742.413.727
17	Kab. Nganjuk	10.281.016.157
18	Kab. Ngawi	9.371.877.304
19	Kab. Pacitan	5.605.083.997
20	Kab. Pamekasan	23.828.852.235
21	Kab. Pasuruan	21.684.068.979
22	Kab. Ponorogo	6.279.224.093
23	Kab. Probolinggo	14.130.809.048
24	Kab. Sampang	6.318.031.578



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
25	Kab. Sidoarjo	11.559.351.436
26	Kab. Situbondo	8.015.720.364
27	Kab. Sumenep	13.009.313.588
28	Kab. Trenggalek	5.758.717.203
29	Kab. Tuban	7.336.286.784
30	Kab. Tulungagung	14.460.400.095
31	Kota Blitar	6.889.083.055
32	Kota Kediri	45.315.653.918
33	Kota Madiun	5.172.941.972
34	Kota Malang	18.304.432.084
35	Kota Mojokerto	6.088.973.305
36	Kota Pasuruan	5.193.992.104
37	Kota Probolinggo	5.026.388.216
38	Kota Surabaya	16.815.763.198
39	Kota Batu	5.534.877.454
XIV	Total Provinsi Kalimantan Tengah	1.653.512.091
1	Provinsi Kalimantan Tengah	496.053.629
2	Kab. Barito Selatan	38.157.971
3	Kab. Barito Utara	38.157.971
4	Kab. Kapuas	38.157.971
5	Kab. Kotawaringin Barat	38.157.971
6	Kab. Kotawaringin Timur	38.157.971
7	Kota Palangkaraya	38.157.971
8	Kab. Barito Timur	38.157.971
9	Kab. Murung Raya	38.157.971
10	Kab. Pulang Pisau	661.404.839
11	Kab. Gunung Mas	38.157.971
12	Kab. Lamandau	38.157.971
13	Kab. Sukamara	38.157.971
14	Kab. Katingan	38.157.971
15	Kab. Seruyan	38.157.971
XV	Total Provinsi Sulawesi Utara	1.569.707.450
XVI	Total Provinsi Sulawesi Tengah	1.891.784.047
XVII	Total Provinsi Sulawesi Selatan	7.258.457.261
1	Provinsi Sulawesi Selatan	2.177.537.178
2	Kab. Bantaeng	97.134.029



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
3	Kab. Barru	103.503.130
4	Kab. Bone	590.793.588
5	Kab. Bulukumba	147.750.427
6	Kab. Enrekang	90.730.715
7	Kab. Gowa	90.730.715
8	Kab. Jeneponto	90.730.715
9	Kab. Luwu	91.055.727
10	Kab. Luwu Utara	90.730.715
11	Kab. Maros	90.730.715
12	Kab. Pangkajene Kepulauan	91.682.963
13	Kab. Pinrang	90.730.715
14	Kab. Selayar	90.730.715
15	Kab. Sidenreng Rappang	90.730.715
16	Kab. Sinjai	478.464.755
17	Kab. Soppeng	2.005.129.526
18	Kab. Takalar	90.730.715
19	Kab. Tana Toraja	100.401.258
20	Kab. Wajo	103.845.249
21	Kota Pare-pare	90.730.715
22	Kota Makassar	90.730.715
23	Kota Palopo	90.730.715
24	Kab. Luwu Timur	90.730.715
25	Kab. Toraja Utara	91.660.136
XVIII	Total Provinsi Bali	7.494.103.513
XIX	Total Provinsi Nusa Tenggara Barat	131.590.571.590
1	Provinsi Nusa Tenggara Barat	39.477.171.477
2	Kab. Bima	6.643.139.560
3	Kab. Dompu	3.438.170.588
4	Kab. Lombok Barat	10.170.555.325
5	Kab. Lombok Tengah	18.084.954.823
6	Kab. Lombok Timur	35.551.273.813
7	Kab. Sumbawa	6.651.723.959
8	Kota Mataram	1.436.452.186
9	Kota Bima	2.591.431.648
10	Kab. Sumbawa Barat	3.098.136.954
11	Kab. Lombok Utara	4.447.561.257



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

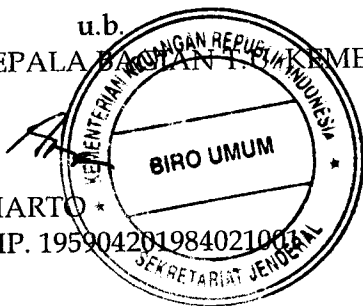
NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
XX	Total Provinsi Nusa Tenggara Timur	2.504.835.285
1	Provinsi Nusa Tenggara Timur	751.450.586
2	Kab. Alor	46.946.668
3	Kab. Belu	188.976.786
4	Kab. Ende	38.672.195
5	Kab. Flores Timur	35.783.361
6	Kab. Kupang	35.783.361
7	Kab. Lembata	369.948.704
8	Kab. Manggarai	35.783.361
9	Kab. Ngada	35.783.361
10	Kab. Sikka	102.804.596
11	Kab. Sumba Barat	146.359.192
12	Kab. Sumba Timur	60.420.527
13	Kab. Timor Tengah Selatan	42.817.300
14	Kab. Timor Tengah Utara	35.783.361
15	Kota Kupang	35.783.361
16	Kab. Rote Ndao	35.783.361
17	Kab. Manggarai Barat	56.810.623
18	Kab. Nagekeo	35.783.361
19	Kab. Sumba Barat Daya	271.638.295
20	Kab. Sumba Tengah	35.783.361
21	Kab. Manggarai Timur	35.783.361
22	Kab. Sabu Raijua	70.156.203
Total		1.201.357.959.913

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BUREAU KEMENTERIAN

GIARTO
NIP. 195904201984021003



MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO